

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang adalah suatu kegiatan pembelajaran di lapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan dalam dunia kerja nyata. pembelajaran itu terutama dilaksanakan melalui hubungan yang intensif antara peserta program magang dan tenaga pembinanya di instansi. Mengenal dunia kerja yang sebenarnya agar memahami sejauh mana harus mempersiapkan diri apabila nanti memasuki dunia kerja.

Kegiatan Magang atau Kerja Praktik ini adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dengan tugas langsung di Lembaga BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintahan. Magang atau Kerja Praktik memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengabdikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di kampus. Kegiatan ini merupakan wujud relevansi antara teori yang didapat selama di perkuliahan dengan praktik yang ditemui baik dalam dunia usaha khususnya kegiatan yang ada di pemerintahan. Magang dipandang perlu karena melihat pertumbuhan dan perkembangan lingkungan yang cepat berubah.

Program magang merupakan suatu wadah untuk mendorong para mahasiswa agar belajar secara langsung di perusahaan dengan melihat bagaimana kondisi nyata di lapangan. Dengan adanya magang diharapkan dapat memberikan mahasiswa pengalaman empiris yang nantinya akan meningkatkan kreativitas, kemandirian, dan menemukan pengetahuan yang didapat dari permasalahan riil. Magang juga dapat memberikan bekal kepada mahasiswa sebelum menjalankan kegiatan kerja yang sebenarnya. Selain itu, magang juga memiliki tujuan yaitu, memaksimalkan potensi mahasiswa karena secara tidak langsung dalam magang mahasiswa akan terlatih untuk bekerja dengan menerapkan teori yang telah didapat dan memperluas jaringan dengan orang-orang baru yang memiliki keahlian pada bidang tertentu sehingga para mahasiswa akan mendapat ilmu-ilmu yang baru.

Dunia pendidikan di Indonesia pun terus melakukan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Program Merdeka Belajar Kampus merdeka

merupakan salah satu batu loncatan tingkat perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk dapat menghasilkan lulusan yang mumpuni dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, berkarakter serta memenuhi kebutuhan dunia kerja. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan yang dibuat oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang berlandaskan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu bentuk dari pembelajaran yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui dunia nyata dan dinamika lapangan. Melalui program MBKM yang telah dilakukan diharapkan hard dan soft skills dari mahasiswa akan terbentuk. Dengan tuntutan dunia industri saat ini, program MBKM dapat membantu perguruan tinggi menghasilkan lulusan terbaik. Salah satu bentuk kegiatan dari program MBKM adalah magang industri, magang MSIB, magang Mandiri dan lain-lain.

Perwujudan Program Studi Teknik Lingkungan untuk menciptakan lulusan yang unggul dan profesional, maka diperlukan latihan penerapan ilmu pengetahuan yang didapat dibangku kuliah pada dunia nyata (kerja), khususnya dunia kerja Teknik rekayasa dan manajemen. Hal ini dimaksudkan agar setiap lulusan Program Studi siap kerja dan bersaing dalam dunia global. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya program merdeka belajar diharapkan lulusan Program Studi Teknik Lingkungan menjadi lulusan yang berkualitas, unggul dan mampu berkarya di dunia kerja. Kegiatan ini sangat penting karena mahasiswa dapat mengetahui sejauh mana perkembangan komunikasi dan cara kerja yang ada pada sebuah instansi, sehingga dapat membentuk pola pikir yang terarah dan membangun. Selain itu, juga dapat mempersiapkan mahasiswa untuk dapat melakukan kerjasama dan komunikasi aktif antar rekan dalam suatu instansi.

Sesuai dengan kurikulum Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, UPN "Veteran" Jawa Timur, yaitu adanya kegiatan magang ini dipilihlah Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Adapun penyusunan proposal pengajuan kerjasama ini didasari dari terkait Sinergi Pelaksanaan Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Oleh karena itu,

berdasarkan latar belakang tersebut maka proposal disusun untuk dapat dilakukannya kerjasama kegiatan magang atau kerja praktik untuk mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dalam pelaksanaan kegiatan magang ini, yaitu:

Tujuan diadakannya magang yaitu :

1. Memperkenalkan Mahasiswa pada dunia kerja sehingga dapat memiliki wawasan dan pengalaman.
2. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan Mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh pada perkuliahan dan mengaplikasikan ke dalam lingkungan kerja.
3. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Meningkatkan Kemampuan Softskill dan Hardskill Mahasiswa.

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam pelaksanaan magang ini, yaitu:

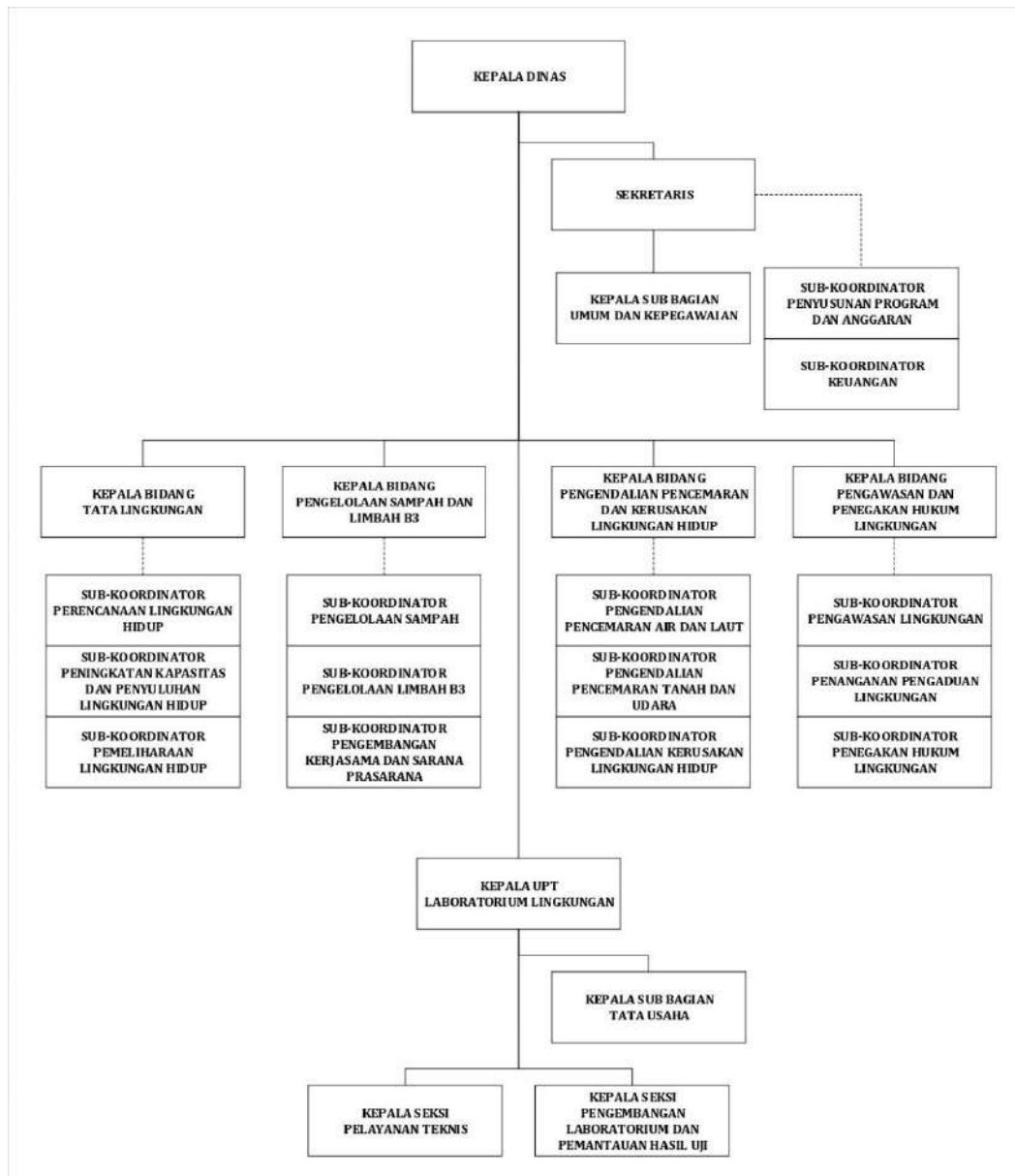
1. Magang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
2. Magang dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu terhitung sejak 29 Februari – 29 Juni 2023.
3. Mempelajari struktur organisasi dan prosedur kerja di DLH Provinsi Jawa Timur, serta gambaran umum Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum DLH Provinsi Jawa Timur
4. Mempelajari terkait peraturan undang – undang yang digunakan untuk penataan industri
5. Mengerjakan laporan Pengawasan Tidak Langsung
6. Mengikuti perjalanan Dinas Luar Kota untuk Pengawasan dan Penataan secara langsung.

1.4 Profil Perusahaan

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, BAPEDALDA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berubah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, BAPEDAL berubah nama menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berubah menjadi DLH Provinsi Jawa Timur yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, DLH Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. DLH Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan

1.4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur



Gambar 1. 1 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, maka :

1. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur terdiri atas:

- a. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - 3. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - 4. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1.4.2 Struktur Organisasi Bidang Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Bidang Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris